

## ABSTRAK

Francine Eustacia Vevila Widjojo (0920612018), Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Reklame Pada Sarana Umum (Studi Kasus di Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan). Di bawah bimbingan Drs. Djamhari Hamza, S.H., M.H., M.M.

Reklame erat kaitannya dengan dunia usaha dan merupakan salah satu tahapan dalam pemasaran yang memiliki peranan penting untuk mempromosikan barang atau jasa yang ditawarkan kepada banyak orang. Reklame bertujuan untuk menarik perhatian, mempertahankan perhatian yang sudah ada, atau menggunakan perhatian yang telah ada untuk menggerakkan konsumen agar bertindak terhadap barang atau jasa yang dipromosikan. Penempatan reklame yang strategis diyakini berdampak positif pada penjualan. Di samping itu, penempatan reklame juga merupakan bagian dari penataan wajah kota sehingga perlu diatur penempatannya. Saat ini kita jumpai banyak sarana umum antara lain tiang listrik, jembatan penyeberangan orang, dan halte di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan menjadi sarana penyelenggaraan reklame dari berbagai produk dan layanan jasa seperti rumah disewakan, kursus privat, dan lain sebagainya. Sanksi hukum terhadap penyelenggaraan reklame yang melanggar peraturan perundang-undangan lebih sering diterapkan pada reklame papan berukuran besar karena nilai pendapatan daerah berupa pajak reklame yang diperoleh dari reklame tersebut cukup besar sehingga dapat membantu pencapaian target pendapatan daerah. Penulisan ini membahas pengaturan tentang reklame dan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan reklame pada sarana umum berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode penyimpulan deduktif yaitu melakukan analisis terhadap permasalahan yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan sehingga bahan utama yang akan ditelaah adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier di mana sasaran penelitiannya adalah asas-asas hukum yang terkait dengan ketertiban, kepastian hukum, dan keadilan hukum yang dapat ditegakkan pada penyelenggaraan reklame pada sarana umum di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Penyelenggaraan reklame pada sarana umum merupakan tindak pidana namun sanksi hukumnya tidak diterapkan sehingga hal ini tidak membuat jera para pelanggar dan para pelanggar tersebut cenderung untuk mengulanginya kembali. Selain melanggar peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan reklame pada sarana umum mengurangi pendapatan asli daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan dari pajak reklame serta merusak estetika Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Kata kunci: reklame, ketertiban umum, sarana umum

## **ABSTRACT**

Francine Eustacia Vevila Widjojo (0920612018), Law Enforcement of Advertisement at Public Facilities (Case Study in South Jakarta Administration City Government). Under the guidance of Drs. Djamhari Hamza, SH, M.H., M.M.

Advertisement is closely related to the business world and is one of the marketing stages that has an important role to promote goods or services offered to many people. Advertisement aims to attract, retain existing interest, or use an existing concern to drive consumers to take action against the goods or services that is being promoted. Placement of the advertisement is strategically believed to have a positive impact on sales. In addition, placement of the advertisement are also part of the city's aesthetic that needs to be arranged. These days we have seen a lot of public facilities such as utility poles, pedestrian crossing bridge, and bus shelter in South Jakarta Administration City become advertisement's spot of products and services promotion such as house for rent, private course, and so forth. Legal sanction of the placement of advertisement that violated the regulation more often applied to large billboard because the tax revenue derived from the large billboard is large enough to achieve the target of regional revenue's. This study aims to describe the regulation of advertisement and law enforcement of advertisement according to provincial regulations of Jakarta with normative juridical approach with deductive inference method by doing an analysis of the problems focused on the research literature such as primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials based on legal principles related to the order, rule of law, and justice laws that can be enforced in the implementation of advertisement at public facilities in South Jakarta Administration City. Advertisement's placement at public facilities is a crime but legal sanction is not applied, that is way it does not deter offenders and offenders are likely to repeat it again. Besides violating the regulations, organizing advertisement at public facilities reduce revenue of South Jakarta Administration City from advertisement tax and ruin the aesthetic of South Jakarta Administration City.

Keywords: advertising, public order, public facilities